



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BKD KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2020**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Telp. 0285 - 429451**

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT dengan sebenar-benar pujian. Salam sejahtera semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik makhlukNya, Muhammad Rasulullah SAW.

Atas kerjasama semua pihak terkait, akhirnya Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap OPD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja dan menjadi sumber informasi yang dibutuhkan.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Pekalongan, Agustus 2021

Kepala BKD Kota Pekalongan



Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631111 198902 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
A. Gambaran Umum Dinas	2
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Isu Strategis.....	6
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Perencanaan Strategis.....	9
1. Rencana Strategis	9
2. Indikator Kinerja Utama	12
3. Perjanjian Kinerja 2020	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	17
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	20
D. Akuntabilitas Keuangan	38
BAB IV P E N U T U P	40

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut BKD Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BKD Kota Pekalongan Tahun

2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

A. Gambaran Umum Dinas

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Kota Pekalongan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. SKPD ini merupakan gabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan Setda dan Bagian Aset Setda Kota Pekalongan. Pada tahun 2013, terbit Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang salah satu di dalamnya memuat perubahan Susunan Organisasi BKD Kota Pekalongan.

Pada tahun 2020 terbit Peraturan Walikota no. 69 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan keuangan daerah. Yang salah satu di dalamnya menyebutkan susunan Organisasi BKD terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub bagian Keuangan; dan
 - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi
 - a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Subbidang Penetapan dan Keberatan; dan
 - c. Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi.
4. Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan
 - a. Subbidang Penagihan dan Penindakan;
 - b. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
 - c. Subbidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak.
5. Bidang Anggaran
 - a. Subbidang Perencanaan Anggaran;
 - b. Subbidang Anggaran Belanja; dan
 - c. Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai dan Pembiayaan.
6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

- a. Subbidang Penatausahaan Keuangan;
 - b. Subbidang Belanja Pegawai dan Belanja Tak Terduga; dan
 - c. Subbidang Kas Daerah.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 - a. Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
 - b. Subbidang Penyusunan Data Laporan Keuangan; dan
 - c. Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan.
 8. Bidang Pengelolaan BMD
 - a. Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD;
 - b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD; dan
 - c. Subbidang Penatausahaan BMD,
 9. UPTB; dan
 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tugas dan Fungsi

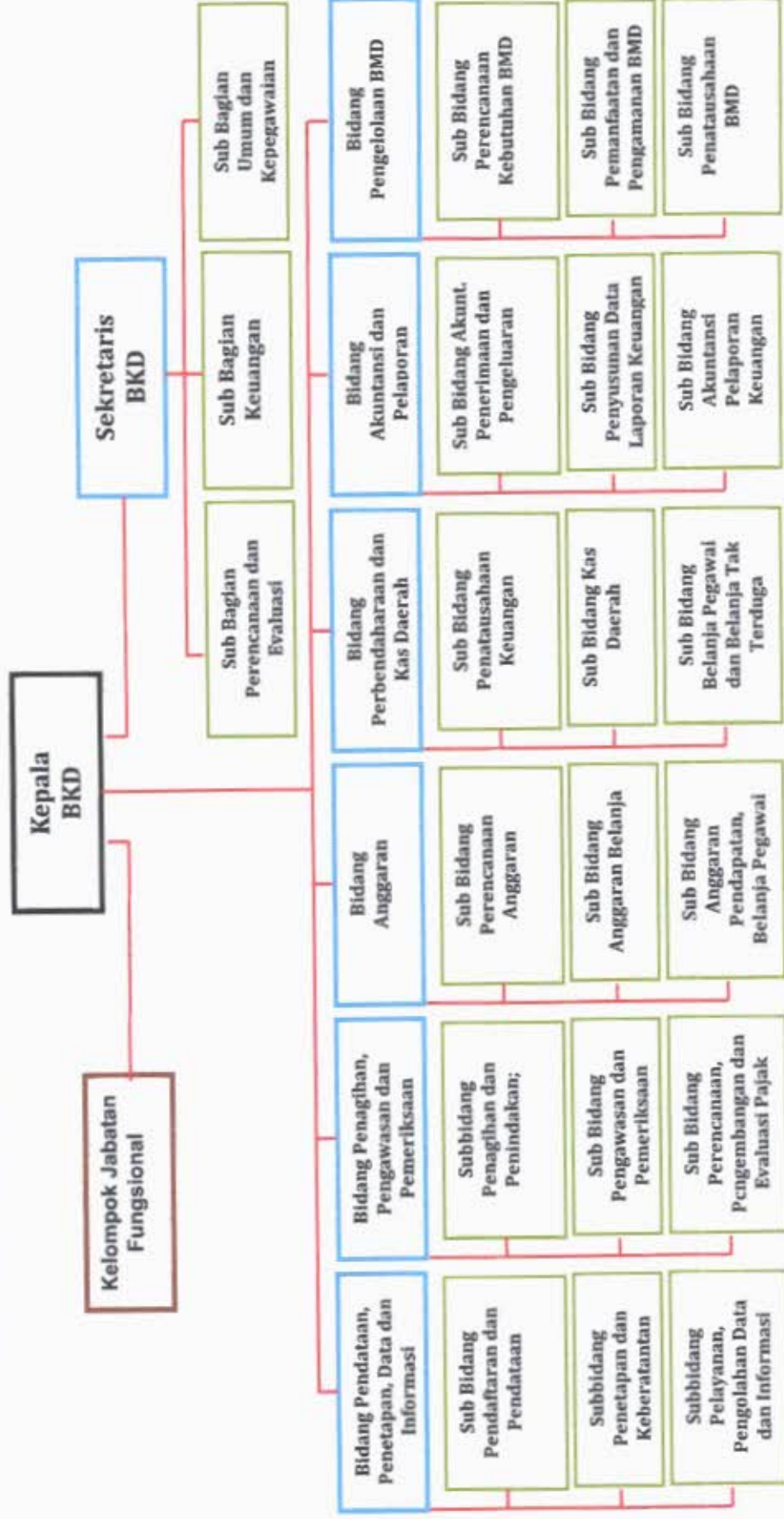
Sedangkan tugas dan fungsi rincian tugas BKD Kota Pekalongan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2020. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Kota Pekalongan memiliki tugas pokok yaitu pendukung Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun fungsinya sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Perumusan kebijakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pendataan, penetapan, data dan informasi pendapatan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pendapatan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang anggaran;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perbendaharaan dan kas daerah;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang akuntansi dan pelaporan;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengelolaan BMD;

9. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
10. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
11. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH**



C. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BKD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis BKD Kota Pekalongan yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan BKD yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;
2. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu;
3. Mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana;
5. Peningkatan Pendapatan dari tahun sebelumnya melalui koordinasi yang solid dengan instansi pengelola pendapatan;
6. Penatausahaan aset daerah secara tertib.

D. Landasan Hukum

LKjIP Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
 4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan adalah perubahan atas Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan yang merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan. Rencana Strategis BKD Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BKD Kota Pekalongan Nomor 050/079 Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Nomor 050/065 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a) Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan terpilih periode 2016-2021 adalah **"Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas"**, dengan Misi :

- 1) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- 3) Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
- 5) Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;

6) Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BKD Kota Pekalongan, hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu: "Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat". Peran serta BKD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

b) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	600	700	800	800	850	900
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP (AKIP)				80	82,5	85
			Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Daerah Berkualitas						
			Persentase peningkatan PAD	5,29%	9,70%	9,75%	10%	10%	10%

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	
				Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai	Nilai KIP OPD tahun n	Dinkominfo
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai LkjIP (AKIP)	Nilai	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Inspektorat
		Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	%	Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah dari BPK: WTP : 100% WDP : 75%	BKD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	
				Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Tidak Wajar : 50% Disclamer : 25%	
		Persentase peningkatan PAD	%	Jumlah PAD Tahun n-PAD tahun dasar (2015) dibagi PAD tahun dasar	BKD

3. Perjanjian Kinerja 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
 Perjanjian Kinerja
 Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
 Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	850
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	82,5
		% Peningkatan PAD	10
		Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	100

Rencana Penganggaran:

NO	NAMA PROGRAM	PAGU
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 13.186.561.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.752.400.000
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 681.490.000
4.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Rp. 23.500.000
5.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 31.640.000
6.	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Rp. 1.234.990.000
7.	Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos	Rp. 6.683.149.000
8.	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Rp. 1.173.572.000
9.	Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	Rp. 609.600.000
10.	Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Rp. 600.515.000
	Jumlah	Rp. 13.186.561.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran

atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021

maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Perubahan Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2017, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	%	850	455	53,53%
2	Nilai Evaluasi LKjIP (AKIP) BKD	%	82,50	81,12	98,33%
3	Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	%	100	100	100%
4	Persentase peningkatan PAD	%	10	51,22	512,20%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Capaian kinerja pada indikator nilai keterbukaan informasi publik dengan capaian kinerja 53,53%. Capaian pada indikator ini tidak melebihi/melampaui target yang ditunjukkan.

Capaian kinerja pada indikator nilai evaluasi LKjIP (AKIP) dengan capaian kinerja 98,33%. Capaian pada indikator ini tidak melebihi/melampaui target yang ditunjukkan.

Capaian kinerja pada indikator pelaporan keuangan daerah berkualitas dengan capaian kinerja n/a diharapkan nantinya opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun anggaran mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atau sesuai target mencapai 100%.

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan capaian kinerja 399,40%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Realisasi PAD tahun 2020 sebesar Rp. 229.926.906.631,95 atau 132,91% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 172.993.386.000,00 seperti tersaji pada Tabel 3.2:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi PAD Tahun 2020

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan Pajak Daerah	65.190.000.000,00	76.255.041.742,00	116,97%
Hasil Retribusi Daerah	13.070.643.000,00	14.869.524.919,00	113,76%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.358.000.000,00	5.821.083.050,00	108,64%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	89.374.743.000,00	132.981.256.920,95	148,79%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	172.993.386.000,00	229.926.906.631,95	132,91%

Sumber: BKD (anaudited BPK RI)

Dari 4 pos penerimaan PAD, semua pos tersebut dapat melampaui target. Kontribusi masing-masing pos dari tertinggi sampai terendah masih yaitu Lain-lain PAD yang Sah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Untuk menghitung capaian Indikator Kinerja Utama, persentase peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan realisasi PAD tahun 2020 dengan realisasi PAD tahun 2015 sebagai tahun kondisi awal Renstra. Pada tabel 3.3 terlihat pertumbuhan PAD dan komponennya.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 dan 2020

URAIAN	REALISASI 2015	TAHUN 2019		% Kenaikan
		TARGET	REALISASI	
Pendapatan Pajak Daerah	47.499.120.190	65.190.000.000,00	76.255.041.742,00	160,54%
Hasil Retribusi Daerah	16.594.929.112	13.070.643.000,00	14.869.524.919,00	89,60%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.181.034.617	5.358.000.000,00	5.821.083.050,00	182,99%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	84.769.512.413	89.374.743.000,00	132.981.256.920,95	156,87%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	152.044.596.332	172.993.386.000,00	229.926.906.631,95	151,22%

Sumber: BKD (anaudited BPK RI)

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan adalah sebagaimana pada Tabel 3.1 diatas.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja OPD pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	25%
2	Sesuai Target	25%
3	Tidak Mencapai Target	50%

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari 2 (dua) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian target Misi

No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	1	-	-	-	-	1	33,33
2	Sasaran 2	3	1	33,33	1	33,33	1	33,33

Dari 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja BKD Kota Pekalongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
Sasaran 1			
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	1	100
Sasaran 2			
1	Melebihi/Melampaui Target	1	33,33
2	Sesuai Target	1	33,33
3	Tidak Mencapai Target	1	33,33

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 4 indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra BKD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021
			Target	Realisasi		Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	800	455	53,53%	850

Catatan :

1. 1000 : Sangat Informatif
2. 900-999 : Informatif
3. 700-899 : Menuju Informatif
4. 600-699 : Cukup Informatif
5. 400-599 : Kurang Informatif
6. 0-399 : Tidak Informatif

Sasaran meningkatnya kualitas layanan publik dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu nilai keterbukaan informasi publik.

Capaian kinerja nilai keterbukaan informasi publik adalah 455 (kurang informatif) dari target nilai yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 53,53%.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Menunjang/ Kurang
		Target	Realisasi		
A	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	31.640.000	31.484.469	Persentase pengaduan	Menjunjang
1	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	31.640.000	31.484.469	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	Menjunjang
2	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	-	-	Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik	-

Dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan publik disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung:

- Telah tersedia media akses Informasi Publik berupa laman website: <https://bakeuda.pekalongankota.go.id/> yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Kota Pekalongan, yang dikelola oleh admin Dinkominfo dan admin BKD. Dengan disediakannya media akses informasi publik juga dapat mendorong transparansi badan publik guna mewujudkan pertanggungjawaban publik oleh BKD Kota Pekalongan, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol terhadap kinerja BKD Kota Pekalongan

Faktor penghambat :

1. Belum adanya sumber daya aparatur yang kompeten yang bertugas sebagai admin web BKD secara khusus, sehingga isi konten dalam web tersebut tidak update secara berkala.
2. Bidang belum secara periodik melaporkan kegiatan sebagai bahan untuk *updating* pada web yang tersedia
3. Belum ada klasifikasi secara jelas mengenai jenis-jenis informasi publik, misalnya: informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang diumumkan setiap saat, dan informasi yang dikecualikan, termasuk juga mengenai informasi tentang pemohon informasi publik

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan publik dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.18
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja		Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	850	455	53,53%	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	31.640.000	31.484.469	99,51%
		CAPAIAN INDIKATOR				53,53%	TOTAL SASARAN	39.907.000,00	37.687.600,00	99,51%
							TINGKAT EFISIENSI			0,49%
							TINGKAT EFEKTIFITAS			46,47%

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan publik pada indikator nilai keterbukaan informasi publik, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka di masa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur melalui koordinasi dan pelatihan dengan admin Dinkominfo dalam pengembangan web dan isi konten
2. Admin BKD berkoordinasi dengan bidang untuk pengisian konten (*updating* berita) secara berkala

Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2022
			Target	Realisasi		Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai LKJIP (AKIP)	nilai	82,5	81,12	98,33%	n/a
2	Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	%	100	100	100,00%	n/a
3	Persentase peningkatan PAD	%	10	51,22	512,20%	n/a
Rata-rata Capaian Kinerja					199,24%	n/a

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu nilai LKJIP, pelaporan keuangan daerah berkualitas dan persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Capaian kinerja indikator Nilai LKJIP (AKIP) adalah sebesar 81,12 dari target sebesar 82,5, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 98,33% atau tidak melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja pada indikator pelaporan keuangan daerah berkualitas dengan capaian kinerja berupa opini dari BPK. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Seluruh rangkaian proses pengelolaan (sosialisasi, rekonsiliasi, asistensi dan lain-lain) keuangan dan asset daerah yang dilaksanakan sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Proses ini disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah yang disusun sampai dengan 31 Maret 2021 oleh Badan Keuangan Daerah, yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan akhirnya hasil penilaian kinerja tersebut dirilis Kementerian Keuangan pada Bulan Juli 2021.

Merujuk pada serangkaian proses tersebut, Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah pada Tahun 2020 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Capaian kinerja nyata indikator Persentase peningkatan pendapatan asli daerah adalah sebesar 51,22% dari target sebesar 10,00% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 512,20% atau melebihi target yang diperjanjikan, capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Menunjang/ Kurang
		Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.752.400.000	1.488.193.026	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000	4.111.100	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	506.400.000	467.779.669	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	135.000.000	135.000.000	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	93.000.000	90.000.000	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	
5	Penyediaan alat tulis kantor	307.500.000	299.070.700	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000	46.542.850	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5.000.000	4.133.500	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	36.000.000	33.265.872	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000	1.925.000	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	
10	Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000	84.129.500	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	511.000.000	322.234.835	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	681.490.000	516.973.617	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80.000.000	29.918.400	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	166.140.000	88.940.717	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	
3	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	150.000.000	148.400.000	Jumlah gedung kantor yang ter rehabilitasi sedang/berat	
4	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	235.350.000	210.442.000	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	50.000.000	39.272.500	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan	

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Menunjang/ Kurang
		Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan perlengkapan gedung kantor			dan perlengkapan gedung kantor	
C	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	23.500.000	19.958.000	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	
1	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	10.000.000	6.980.750	Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun	
				Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	
2	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000	9.801.000	Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun	
				Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi; LKJIP) dan Laporan Laporan Keuangan SKPD yang disusun	
3	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	-	-	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun	
4	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	3.500.000	3.176.250	Jumlah dokumen SPIP yang disusun	
				Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	
				Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	
D	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	6.683.149.000	6.127.058.960	Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	
				Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap	
				Persentase OPD yang menyelesaikan laporan Persediaan	
1	Penyusunan standar satuan harga	100.000.000	94.309.000	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	
2	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	50.000.000	47.700.000	Jumlah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah yang disusun	
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	118.500.000	103.480.000	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala	
4	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	620.125.000	385.716.460	Jumlah Sertifikat yang diajukan	

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Menunjang/ Kurang
		Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Jumlah papan nama aset yang diadakan	
				Jumlah Patok batas tanah yang diadakan	
				Jumlah bidang tanah milik Pemkot yang diinventarisasi	
5	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	58.800.000	41.000.000	Jumlah lelang garapan eks tanah bengkok yang dilaksanakan	
6	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	622.624.000	579.506.500	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	
				Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	
				Jumlah laporan/data pengelolaan BMD	
				Jumlah Sensus BMD yang dilaksanakan	
7	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	199.100.000	99.875.900	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	
8	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	4.734.000.000	4.634.000.100	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan	
9	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	150.000.000	141.471.000	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang direhabilitasi sedang / berat	
10	Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah	30.000.000	-	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	
E	PROGRAM PENYUSUNAN APBD DAN PENGELOLAAN HIBAH BANSOS	1.173.572.000	1.122.788.750	Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	
				Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	
1	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	341.000.000	329.819.500	Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	
				Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	
2	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	359.100.000	354.552.250	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	
				jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	
3	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	106.000.000	97.564.833	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	
				Jumlah dokumen SOP hibah dan bansos yang disusun	
				Jumlah raperwal santunan kematian yang disusun	
				Jumlah laporan realisasi penyaluran belanja hibah dan	

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Menunjang/ Kurang
		Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				bantuan sosial selama satu tahun	
4	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	96.000.000	93.686.917	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	
5	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	209.472.000	185.602.750	Jumlah asistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan	
				Jumlah pelaksanaan asistensi RKA	
6	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	62.000.000	61.562.500	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan	
				Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	
F	PROGRAM PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	609.600.000	544.857.520	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP	
1	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	92.000.000	90.136.000	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	
2	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	-	-	Jumlah buku / Perwal yang disusun	
3	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	167.600.000	108.695.000	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel	
				pendampingan pengembangan aplikasi (SIMRAL)	
				Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	
				Jumlah pendampingan pemanfaatan SIMRAL yang dilaksanakan	
4	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	-	-	Jumlah Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan yang disusun	
				Jumlah Laporan Keuangan Konsolidasi Semesteran yang disusun	
5	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	350.000.000	346.026.520	Jumlah rekonsiliasi laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan	
				Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (laporan keuangan konsolidasi) yang disusun	

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Menunjang/ Kurang
		Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun	
				Jumlah publikasi laporan keuangan	
G	PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH	395.705.000	349.727.500	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD	
				Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	
1	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	58.000.000	30.573.000	Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	
				Jml. Dokumen raperda pengelolaan keuangan daerah yang disusun	
2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	45.000.000	42.896.000	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	
				Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	
3	Fasilitasi MP TP-TGR	30.900.000	25.405.000	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun	
				Jumlah laporan kerugian daerah yang disusun	
4	Fasilitasi pelaporan DAK	35.195.000	30.959.500	Jumlah pelaksanaan penyusunan laporan DAK	
				Jumlah laporan DAK per bidang yang disusun	
5	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	12.060.000	12.060.000	Jumlah pejabat penatausahaan keuangan yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	
				Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	
6	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	49.250.000	48.675.000	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan masa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	
7	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	43.800.000	41.015.000	Jumlah bulan kegiatan updating data gaji dan pencetakan daftar gaji PNS se Kota Pekalongan	
				Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	
8	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	87.500.000	87.480.000	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	
9	Pendampingan transaksi non tunai	34.000.000	30.664.000	Jumlah bulan pendampingan transaksi non tunai	
				Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Menunjang/ Kurang
		Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
H	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	1.234.990.000	1.168.231.500	Persentase Peningkatan potensi pendapatan	
1	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	400.270.000	385.903.400	Jumlah WP/ WR yang dilayani	
2	Penetapan pajak dan retribusi daerah	55.050.000	55.050.000	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	
				Jumlah SKPD/SKRD yang dibuat (pajak reklame, pajak ABT dan retribusi yang dikelola BKD)	
3	Pemutakhiran data PBB	227.700.000	187.327.600	Jumlah data Objek Pajak PBB Kecamatan Pekalongan Utara yang diupdate	
				Jumlah Peta Digital PBB Kecamatan Pekalongan Utara yang diupdate	
				Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2020 disusun	
				Jumlah Buku DHKP PBB 2020 yang disusun	
				Jumlah berkas permohonan Pelayanan PBB yang diproses dan diselesaikan	
4	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	105.000.000	101.970.000	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	
				Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun	
				Jumlah rakor bidang pendapatan yang diselenggarakan	
5	Pengembangan SIM pendapatan daerah	90.800.000	85.490.000	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	
				Jumlah Sistem Informasi Pendapatan yang dilakukan pemeliharaan	
				Jumlah Sistem Informasi baru yang diadakan	
6	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	299.170.000	296.940.500	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	
7	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	57.000.000	55.550.000	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang didata	
				Jumlah Buku Daftar Objek Pajak yang disusun	
I	PROGRAM PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH	600.515.000	525.208.559	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak	
				Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi	
	Penagihan pajak dan retribusi daerah	247.000.000	231.640.000	Jumlah masa pajak yang dibayar	
				Jumlah surat tagihan/surat pemberitahuan pembayaran/surat peringatan yang diterbitkan	

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Menunjang/ Kurang
		Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	47.000.000	37.875.425	Jumlah WPWR yang mengikuti sosialisasi Jumlah kegiatan penyuluhan pajak dan retribusi daerah yang diadakan	
	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	140.515.000	109.697.717	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Reklame, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Pajak	
	Verifikasi BPHTB	98.000.000	87.826.000	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	
	Pemeriksaan pajak daerah	68.000.000	58.169.417	Jumlah Objek Pajak/WP yang diperiksa	

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung:

1. Komitmen dari semua elemen dari kepala kepala daerah hingga staf penyusun LK OPD.
2. Adanya Reward dan punishment yang tegas
3. Adanya rekonsiliasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan sekali
4. Sosialisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada pejabat penatausahaan keuangan daerah
5. Adanya asistensi penyusunan RKA APBD yang melibatkan unsur perencanaan dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran
6. Pemasang alat perekam transaksi para wajib data (tapping box)
7. Telah dilakukannya pemutahiran data PBB secara bertahap disemua kecamatan.
8. Kemudahan pelayanan dengan penerapan e-SPT dan peningkatan fungsi pembayaran pada masing-masing payment point dan kantor kas
9. Dilakukannya pemeriksaan Pajak Daerah
10. Makin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak
11. Makin optimalnya kegiatan Verifikasi BPHTB

Faktor penghambat :

1. Penyusunan LKD tidak tepat waktu
2. Kualitas laporan belum sesuai standart
3. SIMKEU belum memadai
4. Server SIMBADA down
5. SDM kurang mencukupi dan kurang kompeten
6. Data Laporan Neraca Aset Tetap yang terlambat dikirim oleh OPD
7. Kurangnya Sumber Daya Aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas.
8. Belum optimalnya potensi PAD sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
9. Perda-perda atau Perwal yang belum menyesuaikan dengan perubahan perundangan dan kondisi terkini
10. SOP yang perlu dievaluasi
11. Masih perlunya peningkatan kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
12. Rendahnya capaian realisasi pendapatan BLUD RSUD
13. Berkurangnya prosentase penguasaan saham pemerintah Kota Pekalongan pada beberapa BUMD yang mengakibatkan tidak laginya Pemerintah Kota Pekalongan menjadi pemegang saham pengendali
14. Pemanfaatan asset pemerintah yang belum optimal

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.18

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja		Program	Keuangan		%
				Target	Realisasi (%)		Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJP (AKIP)	Nilai	82,5	81,12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.752.400.000	1.488.193.026	84,92%
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	681.490.000	516.973.617	75,86%
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23.500.000	19.958.000	84,93%
		Pelaporan Keuangan Daerah yang berkualitas	Persen	100	100	Program Pengelolaan Aset Daerah	6.683.149.000	6.127.058.960	91,68%
						Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos	1.173.572.000	1.122.788.750	95,67%
						Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	609.600.000	544.857.520	89,38%
						Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	395.705.000	349.727.500	89,39%
		Persentase Peningkatan PAD	Persen	10	51,22	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	1.234.990.000	1.168.231.500	94,59%
						Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	600.515.000	525.208.559	87,46%
		CAPAIAN INDIKATOR			236,84	TOTAL SASARAN	13.154.921.000	11.862.997.432	90,18%
						TINGKAT EFISIENSI			9,82 %
						TINGKAT EFEKTIFITAS			

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pada indikator nilai LkjIP (AKIP), pelaporan keuangan daerah yang berkualitas, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka di masa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

1. Untuk mempertahankan opini WTP perlu adanya komitmen dari semua elemen Pemda, meliputi Kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya;
2. Perlu adanya integrasi system informasi pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan asset daerah.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pada indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka di masa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dan Penambahan jumlah Aparatur yang membidangi pendapatan.
2. Peningkatan basis data, penyusunan data potensi dan pemutakhiran data potensi.
3. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan
4. Menyederhanakan SOP pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan pelayanan serta penerapan secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan daerah (Penerapan Pajak Online)
5. Sosialisasi dan pemberian reward and punishment serta pelaksanaan pemeriksaan pajak
6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan RSUD.
7. Upaya penambahan penyertaan modal kepada BUMD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar dapat menunjang rencana bisnis BUMD sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
8. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi kekayaan daerah.

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai BKD Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. DPA Belanja Langsung BKD Kota Pekalongan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 13.186.561.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.894.481.901,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,20%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra BKD Kota Pekalongan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Pagu dan Realisasi Anggaran BKD Kota Pekalongan
Tahun 2020

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	31.640.000	31.484.469	99,51
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	13.154.921.000	11.862.997.432	90,18
	Jumlah	13.186.561.000	11.894.481.901	90,20

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh BKD Kota Pekalongan pada tahun 2020 adalah sebesar 9,80%.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian tujuan dan sasaran BKD Kota Pekalongan, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.20
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi BKD Kota Pekalongan
Tahun 2020

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
	Sasaran 1	1		31.484.469	99,51
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	1	100,00 %		

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
	Sasaran 2	3		11.862.997.432	90.18
1	Melebihi/Melampaui Target	1	33,33%		
2	Sesuai Target	1	33,33%		
3	Tidak Mencapai Target	1	33,33%		

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi BKD Kota Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja tujuan dan sasaran organisasi.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 13.186.561.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.894.481.901,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,20%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.292.079.099,-

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan adalah 90,20% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, Agustus 2021
Kepala BKD Kota Pekalongan



Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631111 198902 1 005